

Arkeologi, Dunia Pendidikan, Otonomi Daerah Dan Jati Diri

Hari Lelono

Keywords: education, school, culture, theory, public archaeology

How to Cite:

Lelono, H. (2006). Arkeologi, Dunia Pendidikan, Otonomi Daerah Dan Jati Diri. Berkala Arkeologi, 26(1), 67-76. <https://doi.org/10.30883/jba.v26i1.925>



Berkala Arkeologi

<https://berkalarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 26 No. 1, 2006, 67-76

DOI: 10.30883/jba.v26i1.925



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

ARKEOLOGI, DUNIA PENDIDIKAN, OTONOMI DAERAH DAN JATI DIRI

T.M. Hari Lelono

I. Pendahuluan

Keprihatinan bangsa Indonesia saat ini adalah merosotnya moral bangsa. Mengapa hal tersebut terjadi, tentunya merupakan permasalahan kita bersama. Salah satu yang dituding menjadi penyebab utama mungkin dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah mencari-cari bentuk yang ideal. Akibatnya, anak didik yang menjadi kurban, selain itu juga materi yang kurang mengacu pada kekhasan bangsa yang multi etnik dan multikultural. Sudah saatnyalah para budayawan; arkeolog dan sejarawan untuk memikirkan materi budaya yang majemuk tersebut di rangkai menjadi salah satu materi pendidikan yang berwawasan kebudayaan Indonesia dalam skala daerah dan nasional.

Setiap bangsa dalam pembentukan kepribadian bangsanya tidak terlepas dari warisan nenek moyangnya berupa tinggalan arkeologis (material) dan konsepsi-konsepsi tentang pandangan hidup (in-material). Kedua unsur budaya tersebut terpelihara dengan baik bahkan menimbulkan rasa percayadiri dan kebanggaan. Hal tersebut justru terjadi sebaliknya di Indonesia, bangsa ini sebenarnya pernah mengalami kejayaan peradaban nusantara, sebagai contoh pada masa Majapahit. Tentunya hal tersebut dapat dijadikan salah satu unsur kebanggaan dan jatidiri, bahwa bangsa kita pernah berjaya dengan kebudayaan yang tinggi. Masih banyak lagi tentang kepahlawanan bangsa kita di Aceh, Makasar, Sulawesi dan lain-lain yang dapat dijadikan panutan keteladannya.

Pada era-globalisasi dan transparansi yang telah canangkan pemerintah, tokoh nasional, LSM maupun lembaga legislatif, tentang suntikan moral dan kepribadian bangsa secara lebih maju, hasilnya masih kurang memuaskan, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Mengapa hal tersebut terjadi merupakan permasalahan yang menarik untuk di kaji

dan dijawab melalui pendekatan budaya. Salah satu aset penting adalah menggunakan dunia arkeologi. Selama ini, arkeologi Indonesia belum dikenal secara luas di negeri sendiri, bahkan menjadi barang langka, aneh, dan tidak populer. Pada satu sisi, data arkeologis yang tersebar diseluruh nusantara ini sangat melimpah dan telah dilakukan penjarangan data-data sejak jaman kolonial sampai dengan saat makalah ini disajikan masih terus berlangsung. Tetapi mengapa sampai tidak dikenal oleh anak bangsa sendiri?, salah siapakah itu? materi arkeologi seperti apakah yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menjadi suatu salah satu sumber dalam pembentukan jati-diri bangsa? jawaban yang segera perlu kita lakukan adalah dengan pemasyarakatan arkeologi secara gencar terprogram dan sistematis melalui dunia pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, kurikulum yang bermuatan informasi arkeologi masih sangat lemah, sehingga perngetahuan anak-didik sebagai generasi penerus sangatlah terbatas atau bahkan tidak mengetahui. Pada sisi lain telah terjadi pula benturan-benturan kepentingan antara masyarakat, pemerintah daerah dengan arkeologi yang masing-masing mengklaim kepentingan berdasarkan ukuran keuntungan materiil dan dikalangan arkeolog masih pada ideaslisme ilmu pengetahuan.

Kembali pada masalah pembentukan jati diri bangsa baik skala nasional, regional maupun lokal, permasalahan tersebut sebenarnya akan dapat dijawab apabila pemerintah eksekutif/ legeslatif, LSM dan arkeologi Indonesia secara sadar dan tanggung jawab bersama-sama membangun jatidiri bangsa. Arkeologi Indonesia telah memiliki materi/ data yang relatif lengkap dari berbagai daerah. Itulah modal utama yang harus kita persembahkan kepada masyarakat luas melalui dunia pendidikan.

II. Sumberdaya Arkeologi

Secara kelembagaan pemerintah Indonesia memiliki lembaga arkeologi baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah. Ditingkat pusat di bawah naungan Deputi Sejarah dan Purbakala dengan kantor-kantor pusat seperti Pusat Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), Direktorat perlindungan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), sedangkan di daerah; Balai Arkeologi dan Balai Penyelamatan Peninggalan Purbakala (BP3). Pada tahun 1976 telah berdiri lembaga profesi dengan

nama Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI). Anggota IAAI tersebar di pelbagai pelosok tanah air, mereka bekerja di lembaga pemerintah, swasta dan LSM. Secara implisit, IAAI di antara misinya adalah: pengembangan, pemasyarakatan, dan pengelolaan sumberdaya arkeologi, serta melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan arkeologi. Namun sayang, keberadaan lembaga pemerintah dan profesi tersebut belum maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, baru mendapat 'lirikan kecil' dari dunia akademik saja. Oleh karena itu, pemberdayaan sumberdaya manusia masih perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan pada masa mendatang, peran aktif serta kesadaran pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang salah satu unsurnya adalah membangun sikap mental dan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya.

Tinggalan benda-benda (materi) arkeologis baik berupa bangunan candi, benteng, makam, arca dan alat perlengkapan hidup manusia telah banyak ditemukan. Dari beberapa data arkeologis tersebut telah pula dilakukan kajian yang mendalam sehingga menjadi bahan materi dalam rangka penyusunan sejarah nasional dan menjadi salah satu acuan pokok dalam pembangunan Indonesia. *Materialism archeology* merupakan modal utama yang dapat kita kembangkan dan sumbangkan kepada masyarakat berupa informasi-informasi arkeologis yang disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan suatu kelompok masyarakat. Selama ini, kajian arkeologis masih bercokol pada aspek akademik yang sulit dimengerti oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, produk kajian arkeologis berupa informasi tersebut perlu disederhanakan baik gaya dan bahasanya dalam bentuk ilmiah populer supaya mudah diterima diimplimentasikan untuk konsumsi masyarakat luas.

Data empirik di lapangan, dalam setiap kegiatan penelitian arkeologis, masih sering dijumpai masyarakat baik itu dunia pendidikan dan masyarakat luas, bahkan pemerintah daerahpun masih kurang paham, apa itu peran dan fungsi dari arkeologi. Ketidak-tahuan mereka adalah kelemahan kita dalam mensosialisasikan arkeologi, padahal disadari atau tidak, mereka tahu bahwa, di daerah mereka terdapat benda-benda kuna yang dijaga kelestariannya baik oleh dukun maupun para tua-tua desa

bahkan masih banyak yang dikeramatkan dan pada saat tertentu dilakukan dengan serangkaian upacara adat. Kasus tersebut apabila kita tindaklanjuti dengan gaya dan pola berpikir mereka, tentunya akan memberikan pemahaman baru yang konstruktif terkait dengan tinggalan budaya di daerahnya. Diharapkan secara perlahan dapat pula menambah rasa percaya diri (kebanggaan) baik individu maupun secara kolektif. Dengan rasa memiliki, secara sadar mereka akan menghargai warisan nenek moyangnya untuk dijaga kelestarian benda-benda arkeologis maupun lingkungan sekitar dimana benda-benda (BCB) tersebut berada. Pengenalan terhadap benda arkeologis secara dini akan memudahkan untuk lebih merasa memiliki. Dengan mengenal budaya lokal/ sendiri tersebut dapat merasakan dan melihat nilai-nilai positif dari warisan nenek moyang. Setelah memahami budaya sendiri, barulah belajar mengenal budaya orang lain. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia terdiri dari banyak sekali ragam budaya-budaya pada masing-masing wilayah dan suku yang tersebar luas, dalam konteks tersebut dikenal dengan istilah *multikulturalisme*.

Lawerece A. Blum mendefinisikan multikulturalisme dengan cukup jelas, menurut dia multikulturalisme adalah 'sebuah pemahaman, penghormatan dan penilaian atas budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Ahimsa Putra, 2004: 5). Dalam konteks tersebut seseorang yang mempelajari tidak harus menganut pada paham tersebut, tetapi dalam interaksi yang akan terjadi dengan memahami budaya orang lain kita dapat menyesuaikan diri, sehingga tidak terjadi benturan nilai/ kepentingan tetapi justru menimbulkan rasa saling menghormati, sehingga langkah-langkah yang akan dicapai melalui rasa kebersamaan untuk sesuatu tujuan.

Warga masyarakat kita umumnya kurang memahami budaya lain, dan tidak terlalu mengherankan, karena pemahaman mereka tentang budaya sendiri ternyata umumnya juga masih rendah. Misalkan saja, di kalangan orang Jawa. Walaupun bahasa Jawa jelas-jelas diketahui memiliki tiga tingkatan (*ngoko*, *krama madya* dan *krama inggil*) namun ternyata tidak semua orang Jawa dapat menggunakan

tiga tingkatan bahasa tersebut dengan baik. Kalaupun pengetahuan mengenai media komunikasi dalam budaya sendiri saja sudah rendah, apalagi pengetahuan mengenai unsur budaya lain yang tidak sepele bahasa; apalagi pengetahuan mengenai unsur-unsur budaya yang ada dalam kebudayaan lain (Ahimsa, Putra, 2004: 6). Memang untuk memahami budaya etnis lain tidaklah mudah, tetapi jika kita mengenal salah satu unsurnya saja misalkan bahasanya sebagai alat komunikasi, akan menjadi sangat efektif karena dari komunikasi yang dilakukan antara dua etnis yang berbeda tersebut akan terjadi pertukaran pengalaman berdasar pada masing-masing budayanya. Dari komunikasi tersebut secara tidak langsung telah terjadi transfer informasi yang dapat dipahami oleh kelompok masing-masing. Oleh karena itu, jika kita dapat memahami budaya kita dengan baik, kemudian juga mempelajari salah satu unsur saja budaya etnis lain akan sangat membantu dalam rangka kita mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya yang ada di nusantara ini.

IV. Peran dan Kerjasama Arkeologi

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa arkeologi Indonesia dapat memberikan sumbangan pada masyarakat utamanya melalui dunia pendidikan. Serangkaian rekonstruksi dari hasil penelitian baik skala lokal maupun nasional dapat dijadikan acuan dalam pembentukan sejarah nasional maupun sejarah-sejarah lokal. Ini adalah tanggungjawab kita bersama dengan para sejarawan, dunia pendidikan dan pemerintah daerah untuk duduk bersama-sama melakukan rekonstruksi sejarah budaya. Hasil rekonstruksi tersebut dipilah-pilah mana yang dapat menambah kebanggaan dan yang bernilai tinggi untuk dijadikan bahan dasar kurikulum pendidikan dasar menengah dan atas sebagai bahan muatan lokal.

Upaya kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait tidaklah mudah tanpa suatu pendekatan dan pemahaman akan nilai penting budaya, khususnya tinggalan arkeologis. Salah satu cara adalah dengan melakukan komunikasi aktif dan penyebaran informasi melalui media cetak elektronik dan secara langsung melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Mengapa itu perlu dilakukan ?, karena di kalangan legislatif dan yudikatif masih sering pula mengesampingkan tinggalan budaya. Hal tersebut bisa terjadi karena tiadanya informasi dan kurangnya

popularitas instansi arkeologi. Hendaklah kita introspeksi untuk mengevaluasi seluruh program arkeologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan kepentingannya untuk dan oleh masyarakat luas, utamanya generasi muda melalui dunia pendidikan dasar (SD), menengah (SMP) dan atas (SMA).

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang otonomi daerah, perkembangan baru model pemerintahan daerah tersebut dapat menjadi momentum yang tepat bagi dunia arkeologi Indonesia untuk bangkit. Hal tersebut secara optimistis perlu dilakukan, karena dalam beberapa pasal Undang-undang otonomi daerah juga memuat tentang pemberdayaan kebudayaan.

V. Otonomi Daerah Sebuah Peluang

Memasuki era reformasi pembangunan pada kurun waktu empat tahun terakhir ini, dalam memenejemen pemerintahan isu yang paling mengemuka adalah mengenai implementasi atau pemberlakuan otonomi daerah dan pewujudan *good govermence* dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemberlakuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, mempertegas pemikiran kritis selama ini mengenai pergeseran kewenangan dalam perencanaan pembangunan dari konsep sentralisasi ke konsep desentralisasi, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, termasuk didalamnya adalah bidang kebudayaan.

Sejalan dengan otonomi daerah, otonomi kebudayaanpun harus segera dilakukan, khususnya dalam hal pemberdayaan nilai-nilai tradisi. Proses desentralisasi kebudayaan akan memberi ruang bagi tumbuhnya kreativitas di daerah. Oleh karena itu, kantong-kantong (*incalve*) kebudayaan yang tersebar diberbagai pelosok nusantara haruslah dikembangkan dengan sikap terbuka.

Nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai bagian dari masa depan Indonesia dan dikembangkan secara kreatif. Sebab jika tidak, selain terus menerus dipinggirkan, maka kantong-kantong budaya itu akan menjadi bersifat defensif

dan konservatif (Mursal Erzen, 1999). Melalui otonomi daerah diharapkan dapat tergali nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang jika direvitalisasi dan diadaptasi dalam masyarakat moderen, bisa menjawab tantangan zaman. Di dalam khasanah budaya-budaya etnik nusantara tersebar banyak sekali butir-butir kearifan tradisional, yang jika diberi roh baru dan direvitalisasi akan mampu memberikan kontribusi dalam merekat persatuan bangsa, maupun menjawab tantangan globalisasi sekalipun.

Butir-butir kearifan lokal berdasarkan tinggalan arkeologis tersebut antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Tentunya dengan adanya perbedaan tersebut harus secara arif dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dalam proses penyebaran informasi dan sosialisasi yang dilakukan. Satu hal yang perlu disosialisasikan dalam rangka pembangunan sikap mental dan moral bangsa adalah, bisa membedakan antara adat, tradisi dan agama. Masalahnya akan menjadi rumit kalau tidak secara arif dapat membedakan kedua batasan tersebut; Di satu sisi adat dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, tidak terlepas dari sistem nilai-nilai kepercayaan yang ada pada masanya (masa lalu), sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan adat-tradisi tersebut; Pada sisi lain, tradisi nenek moyang dengan kondisi masyarakat sekarang (masa kini) sudah berbeda, utamanya pada sistem kepercayaan. Pada masa kini masyarakat sudah mengenal dan menganut agama yang kadangkala sering berbenturan karena adanya perbedaan pemahaman dan nilai-nilai yang ada. Satu hal yang penting untuk memahami

dengan adanya perbedaan tersebut adalah kembalinya kepada nilai-nilai yang universal, berkaitan dengan pesan-pesan moral/ etika adalah hal yang sangat hakiki dan perlu dilestarikan

Melalui salah satu tinggalan arkeologis yang dapat diacu sebagai pembentukan moral dan etika adalah berupa relief yang terdapat pada candi-candi Hindu di Jawa Tengah sekitar abad VIII – X Masehi. Pada Candi Mendut terdapat relief cerita fabel yang sarat dengan pesan moral, seperti penggambaran: Dua ekor bangau menerbangkan seekor kura-kura menggunakan ranting. Sementara itu dibagian bawah terlihat pemandangan anak-anak gembala dan pemburu dengan

beberapa ekor kerbau sedang merumput. Para pemburu lengkap dengan busurnya sedang asyik bercengkerama sambil memandang ke angkasa. Kisah ini dimulai persahabatan antara binatang yang hidup diseperti telaga. Suatu ketika telaga tersebut mengalami kekeringan, Sang kura-kura akan mati jika tidak pindah, Sang Bangau hendak menolong pindah ke telaga dengan air yang melimpah, dengan satu syarat saat terbang dengan menggigit ranting tersebut kura-kura tidak boleh berkata sapaatah kata, apapun yang akan terjadi. Terbanglah mereka melewati sekawanan anak-anak dan pemburu, kawanan ini melihat dan memperolok kura dan dikatakan sebagai kotoran sapi kering yang sedang terbang. Mendengar ejekan dan olokan tersebut, tersinggunglah kura dan hendak menjawab, ketika mulutnya dibuka, maka jatuh dan matilah sang kura-kura. Pesan fabel tersebut memberikan gambaran pada kita; bahwa orang tidaklah bijak jika mudah tersinggung dan marah yang akan berakibat fatal/ merugikan dirinya sendiri (Lelono, 2001: 92 – 93).

VI. Pengembangan Budaya Daerah

Kebijakan pengembangan kebudayaan bertujuan menanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat akan keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya.

Menurut Bayudono (2004); Pembangunan budaya mempunyai karakter dan sifat interdependensi atau memiliki keterkaitan lintas sektoral, spasial, struktural multi dimensi, interdisipliner, bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar dengan memanfaatkan potensi sumber daya pemerataan yang tinggi. Pada hakekatnya pembangunan kebudayaan bertumpu pada keunikan, kekhasan lokal, sehingga menempatkan kebinekaan menjadi sesuatu yang hakiki. Oleh karena itu konsep dasar pengembangan kebudayaan adalah untuk melestarikan dan memperkuat jatidiri.

Dengan demikian pengembangan kebudayaan harus dilakukan dalam sistem yang utuh dan terpadu, bersifat interdisipliner dan partisipatif. Dengan memahami konteks keterkaitan yang sangat kuat tersebut, maka pembangunan budaya

sesungguhnya telah menciptakan suatu sistem atau pola pembangunan yang secara efektif dapat merangkul dan menggerakkan seluruh elemen-elemen pembangunan daerah.

Pembangunan budaya dalam konteks daerah maupun nasional saat ini dihadapkan pada suatu tantangan universal yaitu era globalisasi yang membuka proses lintas budaya (*trans-cultural*) dan silang budaya (*cross-cultural*) yang secara berkelanjutan akan mempertemukan nilai-nilai budaya satu dengan lainnya. Oleh karenanya pembangunan budaya juga diharapkan akan meningkatkan pelestarian budaya lokal/ daerah dan pengembangannya sebagai wahana pembangunan bangsa dan watak bangsa, yang diwujudkan melalui sekurangnya tiga hal, antara lain:

1. Melindungi kebudayaan lokal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan budaya bangsa.
2. Memanfaatkan kebudayaan sebagai suatu upaya penggunaan kebudayaan bangsa untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, pembangunan sektor pariwisata dan lain-lain.
3. Memanfaatkan budaya lokal sebagai acuan dalam kurikulum pendidikan.

Penguatan jatidiri dan kearifan lokal, adalah kunci keberhasilan yang harus diwujudkan dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kebijakan, strategis dan pokok program pembangunan kebudayaan, khususnya menjawab isu regional yaitu belum terbangunnya budaya kritis dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara kebudayaan yang bersifat majemuk, sehingga jatidiri, identitas dan nilai-nilai keunikan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Bayudono, Memupuk Kearifan Budaya Daerah Merangkai Persatuan Bangsa (kebijakan Pengembangan Budaya Daerah). **Dialog Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta**, 20 – 21 Agustus 2004. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Masyarakat Indonesia: Pluralisme Tanpa Multikulturalisme ? Sketsa Pemikiran Antropologis. **Dialog Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta**, 20 – 21 Agustus 2004. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Lelono, HariRelief Candi Mendongeng Fabel, **Intisari**, September 2001, No 458, Jakarta.

Mursal ErsenKonsep Kebudayaan yang Lebih Dinamis, **Kompas**, 17 April 1998.

Van Peursen**Strategi Kebudayaan**, Kanisius Yogyakarta, 1985.